

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi publik merupakan organisasi nirlaba yang bertugas memberikan pelayanan publik yang tidak bertujuan memperoleh laba. Dalam pelaksanaan tugasnya, organisasi publik membuat perencanaan kegiatan serta perencanaan anggaran demi terwujudnya suatu tujuan. Organisasi sektor publik menjadi sorotan masyarakat karena berperan mewujudkan pelayanan publik. Organisasi sektor publik harus selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas publik di hadapan masyarakat yang semakin kritis dan berpengetahuan. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik membuat institusi publik ingin melayani masyarakat sebanyak mungkin, namun ambisi ini seringkali terhalang oleh sumber daya yang dimiliki. Maka dari itu, penting adanya anggaran organisasi sektor publik.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah menetapkan penggunaan pendekatan penganggaran berbasis prestasi kerja atau kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penyusunan anggaran yang memiliki orientasi pada kinerja atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Menurut Polii et al., (2020), “Kinerja keuangan merupakan indikator keuangan dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah menentukan tingkat pencapaian target kegiatan keuangan pemerintah daerah”. Kinerja dapat dijadikan

sebagai gambaran bagaimana program dan kebijakan untuk mengelola tujuan, sasaran, visi, dan tujuan perusahaan telah berhasil dilaksanakan.

Penganggaran berbasis kinerja mempertimbangkan hubungan antara pembiayaan (input), keluaran (output), dan hasil yang diinginkan (outcome) untuk memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan setiap kegiatan. Pengukuran kinerja berkonsep Value For Money dipercaya dapat memperbaiki kinerja sektor publik. Value for Money dapat dicapai jika perusahaan menggunakan biaya input terendah untuk menghasilkan tingkat output tertinggi guna memenuhi tujuannya. Value for Money merupakan sebuah gagasan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja organisasi sektor publik yang mempertimbangkan faktor non-keuangan serta faktor keuangan untuk menentukan tingkat keberhasilan program kerja sektor publik. “Value for Money didasarkan pada tiga faktor utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas” (Polii et al., 2020). Ekonomi berkaitan dengan seberapa banyak organisasi sektor publik dapat mengurangi sumber daya yang digunakan sebagai input dengan memotong pengeluaran yang berlebihan. Efisiensi kemampuan untuk mendapatkan yang terbaik dari serangkaian input yang diberikan atau untuk mendapatkan hasil maksimal dari serangkaian input yang diberikan. Dan efektivitas, sejauh mana hasil program dicapai dalam kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan.

Penting untuk menerapkan Value For Money karena dapat bertindak sebagai penghubung bagi pemerintah daerah untuk mencapai tata kelola pemerintah yang baik. Pengelolaan anggaran yang efektif, tidak terlepas dari pengawasan oleh pengguna anggaran atau lembaga pengawas khusus yang berfungsi mengawasi

proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Penerapan pengelolaan anggaran dengan ide *value for money* pada organisasi sektor publik memiliki beberapa keuntungan, antara lain: (1) meningkatkan efektivitas pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikan tepat sasaran; (2) peningkatan pelayanan publik; (3) biaya layanan yang rendah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan sumber daya; (4) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan umum; dan (5) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap anggaran publik (Haryanto, 2007).

Tata kelola pemerintah yang baik, tidak lepas kaitannya dengan akuntabilitas publik. Prinsip akuntabilitas dan praktik good governance berjalan beriringan. Akuntabilitas publik selalu menjadi bagian dari pengelolaan anggaran. Perlu adanya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, dimana terdapat tekanan dari berbagai pihak terhadap pelaksanaan organisasi sektor publik. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pencapaian/kegagalan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Febrianti, 2021).

Disamping itu, pelaksanaan akuntabilitas berkaitan dengan kebutuhan transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik dalam rangka penegakan hak publik terkait anggaran. Transparansi adalah bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat. Tiga faktor yang menjadi pertimbangan dalam menilai transparansi adalah kebijakan keterbukaan pengawasan, akses informasi yang memungkinkan

masyarakat berinteraksi dengan ketiga cabang pemerintahan, dan penerapan prinsip check and balances antara eksekutif dan legislatif (Moerrin, 2022). Keadilan dapat berkembang apabila transparansi diterapkan pada semua kebijakan tata kelola pemerintahan. Tercapainya *good governance* tidak lepas dari pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Untuk membantu tercapainya hasil yang diinginkan sesuai dengan ukuran kinerja yang ditetapkan, maka harus ada pengawasan internal dan eksternal yang baik dalam mengelola anggaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto merupakan lembaga pemerintah (organisasi publik) yang bertugas memberikan pelayanan publik yang berada pada bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. DPUPUR seringkali dicurigai sebagai sarang non efisiensi dalam menggunakan anggaran belanja. Khususnya pada belanja langsung sering terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai sehingga tujuan tidak tercapai secara ekonomis, efisien, dan efektif. Kinerja anggaran memberikan prioritas yang lebih tinggi pada pengeluaran uang daripada penghematan, yang mengakibatkan banyak anggaran yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak diperlukan, tidak ada efisiensi anggaran, dan banyak penggunaan anggaran yang menyimpang dari tujuan program pemerintah. Masalah lainnya adalah kinerja pemerintah yang buruk disebabkan oleh kelemahan perencanaan dalam alokasi anggaran.

Fenomena yang terjadi adalah kasus dugaan gratifikasi oleh Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan Lestariono (59), ditahan Kejaksaan Negeri Lamongan. Lestariono terbukti telah menerima gratifikasi sebesar Rp 60 juta. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan, Dyah

Ambarwati mengatakan, eksekusi dilakukan setelah menerima amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1288 KUPID SUS/2015 pada (14/12/2016). Lestario dibawa ke Lapas Klas II B Lamongan, Rabu (24/8/2022) siang. Lestario terbukti menerima gratifikasi Rp 60 juta bantuan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP). Bantuan ini diterima tiga gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Kecamatan Maduran, Lamongan (Hamzah, 2022).

Upaya mengatasi permasalahan ini pemerintah daerah harus membuat sistem penganggaran APBD berbasis kinerja anggaran dengan konsep value for money guna mengelola keuangan publik dengan menggunakan prinsip dasar sistem penganggaran kinerja (performance budgeting). Value for Money yang ditekankan dalam pengelolaan anggaran dapat memudahkan pemerintah dalam mencapai good governance yaitu pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien (Saraswati, 2022). Selain itu diperlukan pengawasan yang memumpuni untuk mengawasi kinerja pada setiap unit kerja, sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan mengkaji dan memahami masalah tersebut, dan telah menuangkan informasi tersebut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan diatas, masalah yang diangkat pada penelitaian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money?
3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji, mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money.
2. Untuk menguji, mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money.
3. Untuk menguji, mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep Value For Money.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Adapun beberapamanfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan kontribusi ilmiah tentang Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Pendekatan Value For Money.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai gambaran bagi penelitian selanjutnya sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada.

b. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai evaluasi organisasi untuk menjalankan sistem pengendalian yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi.